



Temuan BPK-RI Dominan pada Periode 2004-2008



mengatakan, rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sudah yang kesekian kalinya dilaksanakan. Hal ini mesti disesuaikan dengan komitmen bersama seluruh SKPD untuk segera menuntaskan temuan-temuan yang ada.

"Sebetulnya Sekda saja cukup untuk membuka kegiatan ini. Tetapi, saya sengaja hadir untuk memberi motivasi kepada semua jajaran untuk segera menyelesaikan temuan," tegas Nasir. Dia menegaskan, jajaran Pemkab Kapuas Hulu hendaknya kooperatif dalam menyelesaikan temuan-temuan di masing-masing instansi. Meskipun temuan tersebut dominan dari periode kepemimpinan terdahulu.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kapuas Hulu, Drs H Syafaruddin MM menjelaskan, Pemkab Kapuas Hulu memang masih ada beberapa temuan yang mesti diselesaikan. "Temuan yang ada dari 2004 hingga 2015 ini, ada temuan sebanyak 130 rekomendasi, dari jumlah itu yang ditindak lanjut 31 rekomendasi, jadi tersisa 99 rekomendasi," singkatnya. (aRm)

PUTUSSIBAU-RK. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu, pada periode 2010-2015 tidak seberapa. Justru paling banyak pada periode 2004-2008.

"Temuan 2004 hingga 2008 itu yang perlu segera diselesaikan, agar tidak menumpuk," kata AM Nasir SH, Bupati Kapuas Hulu ketika membuka Rapat Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Kalbar di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015 di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kapuas Hulu, Kamis (18/6).

Nasir mengungkapkan, temuan BPK-RI periode 2014-2008 bervariasi. Beberapa diantaranya berkaitan dengan service mobil, pembangunan pagar untuk instansi vertikal, pinjaman pihak ketiga. Ini memang kelemahan terdahulu, yang mesti diperbaiki.

"Oleh karena itu, jujur saja, kalau ada temuan terbaru, siapa yang bertanggung jawab tetap harus menuntaskan, walau su-

Bupati ketika membuka rapat. ARWAN HARADI
dah pindah instansi. Karena ini harus diselesaikan agar tidak berlarut-larut," tegas Nasir.

Terkait temuan aset, tambah dia, memang sudah ada sistem yang bagus yang telah disiapkan Pemkab Kapuas Hulu. Tetapi sistem itu perlu dukungan pelaporan data aset dari kecamatan dan SKPD. "Pelaporan tersebut memang rumit namun bila

diterapkan bisa segera selesai," kata Nasir.

Untuk menyelesaikan temuan tersebut, Nasir mengaku sudah banyak melayangkan surat teguran dan peringatan kepada SKPD terkait. Mulai dari surat yang ditandatangani Inspektorat, Wakil Bupati hingga Bupati Kapuas Hulu. Namun masih kurang diindahkan.

Walaupun temuan itu bukan periode SKPD saat ini, jelas Nasir, masing-masing SKPD harusnya saling bantu untuk menyelesaikan masalah temuan-temuan itu. "Kalau semua pihak maksimal, tentu kita dapat meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kalau kabupaten lain bisa, kita pasti bisa," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Nasir